

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah Kab. Solok Selatan mengeluarkan kebijakan berdasarkan instruksi Bupati Solok Selatan Nomor 800/127/BKPSDM.2021 dari hasil rapat Bupati dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada tanggal 21 Desember 2021 di aula kantor Bupati Solok Selatan. Dalam surat edaran tersebut, Bupati Kab. Solok Selatan menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja Kab. Solok Selatan untuk mengajak masyarakat sekitar tempat tinggal mereka minimal 5 (lima) orang untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama atau kedua di pusat pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.

Jika target tersebut tidak mampu dicapai, maka terdapat sanksi yang diberikan berupa penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi terkait.¹ Pada intinya dalam Surat Edaran tersebut pemkab setempat mewajibkan ASN-nya untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19. Pemerintah disana berupaya untuk menggandeng para ASN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mensukseskan program percepatan vaksinasi COVID-19 khususnya di Kab. Solok Selatan.

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk lebih memfokuskan lingkup ASN yang mendapatkan instruksi tersebut yaitu pada Tenaga Kesehatan di

¹ Novitri Selvia, <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok-selatan/21/12/2021/target-vaksinasi-tak-tercapai-walnag-dan-tenaga-kesehatan-bakal-disanksi/> (Diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pada pukul 15.30 WIB)

Puskesmas Pakan Rabaa. Tenaga Kesehatan yang sekiranya peneliti berasumsi bahwa dapat digolongkan pada sumber yang kredibel, yang memiliki latar belakang keilmuan yang paham akan upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat. Serta dalam komunikasi yang dilakukan komunikan akan berpotensi untuk percaya terhadap pesan-pesan yang disampaikan.

Penolakan dan keraguan masyarakat terkait vaksinasi pada beberapa waktu lalu peneliti temukan di Kab. Solok Selatan khususnya di wilayah Pakan Rabaa. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan salah seorang tenaga kesehatan disana, yaitu Ibu Sasmayeti, S.SiT. Beliau menyatakan sering melakukan komunikasi tentang vaksinasi COVID-19 dengan masyarakat yang ia temui ketika melakukan pelayanan kesehatan. Pada umumnya masyarakat menyatakan menolak melakukan vaksinasi COVID-19 karena takut membahayakan tubuh mereka, keraguan akan khasiat yang terkandung apakah benar mampu melindungi sistem kekebalan tubuh dari paparan virus COVID-19, serta karena alasan penyakit yang dideritanya.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Puskesmas Pakan Rabaa dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat, terdapat beberapa kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan vaksinasi disana. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang melakukan vaksinasi di Puskesmas Pakan Rabaa, yaitu Ayu Mutiara, berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Beliau menuturkan bahwa ketika melakukan vaksinasi disana terdapat kekurangan dalam segi pelayanannya, yaitu ruangan yang tidak memadai, sehingga masyarakat yang antre berdesak-desakan menunggu giliran untuk vaksin. Tidak hanya itu, stok vaksin pada saat itu sering kali tidak

mencukupi, sehingga masyarakat yang sebelumnya sudah daftar dan mengantre harus datang kembali keesokan harinya untuk vaksinasi.

Disamping itu, alur pelayanan masyarakat yang akan vaksin juga tidak ada dijelaskan atau diberikan petunjuk, sehingga masyarakat yang berasal dari kalangan lansia cukup kesulitan ketika akan mendaftar untuk vaksinasi. Berdasarkan pengamatan langsung dan pengalaman peneliti melakukan vaksinasi di Puskesmas Pakan Rabaa, fasilitas vaksinasi disana sangat minim sekali, hal ini bisa peneliti rasakan ketika melakukan vaksinasi, dimana bilik untuk suntik vaksinnya tidak memadai, hanya dibatasi oleh satu sekat saja, dan itu cukup membuat masyarakat yang vaksin merasa tidak nyaman terutama wanita. Namun, jika dari tim vaksinasi disana dalam melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 dinilai ramah dan mengayomi masyarakat. Tidak hanya itu, para tim vaksinasi disana juga cekatan dan cepat dalam melakukan pelayanan, dari proses pendaftaran hingga penyuntikan vaksin yang cepat. Serta pengeluaran surat bukti vaksinasi pun dapat diterima masyarakat yang sudah vaksin pada hari itu juga.

Observasi awal juga peneliti lakukan dengan mewawancarai Kepala Puskesmas Pakan Rabaa, yaitu Ibu Esi Candra Wati, S.Farm, Apt. Peneliti memberikan pertanyaan terkait pengalaman beliau dalam melihat fenomena masyarakat yang sebelumnya ragu atau menolak melakukan vaksinasi COVID-19 di daerah tersebut. Beliau menuturkan bahwa dengan keberadaan masyarakat yang cukup heterogen di daerah tersebut, maka alasan penolakan dan keraguan masyarakat pun cukup beragam. Disamping itu, beliau juga menyampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan atau program baru yang dilakukan, tentunya akan menimbulkan dua *feedback* yang berbeda, baik itu yang pro atau yang kontra. Dan sudah seharusnya pihak-pihak yang berperan dan bertanggung

jawab dalam pelaksanaannya juga harus mampu menanggulangi permasalahan yang demikian.

Ketidakmerataan vaksinasi COVID-19 dapat kita lihat pada laporan data vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Pakan Rabaa pertanggal 4 Juni 2022. Pada tahap vaksin dosis 1, masyarakat yang telah vaksin sudah mencapai 87% atau sekitar 17.421 orang yang telah melaksanakan vaksin dosis 1. Sedangkan pada tahap vaksin dosis 2 hanya mencapai hampir setengah dari jumlah masyarakat yang vaksin pada dosis pertama, yaitu 45% atau sekitar 8.929 orang. Dari data tersebut seakan mengisyaratkan bahwa tujuan percepatan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi secara lengkap pada masyarakat belum tercapai sepenuhnya.

Jika dikaji lebih lanjut, tujuan pemerintah untuk menginstruksikan pada ASN disana untuk membantu pemerintah dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi secara lengkap tidak benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semarak vaksinasi hanya terjadi pada saat surat edaran tersebut dikeluarkan, sehingga kampanye vaksinasi yang awalnya sangat gencar dilakukan oleh semua pihak dan oknum hanya berlaku untuk vaksinasi tahap pertama saja. Masyarakat seperti harus terus disokong dan diingatkan agar melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah, sedangkan pemerintah pun tidak sepenuhnya menyelesaikan tugas tersebut dengan baik.

Indonesia sendiri memulai program vaksinasi COVID-19 nasional pada Januari 2021, dengan menargetkan sasaran vaksinasi sekitar 208.265.720 jiwa. Program vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang telah melakukan vaksinasi, akan tetapi juga melindungi masyarakat luas dengan

mengurangi penyebaran virus dalam populasi. Fungsi vaksinasi COVID-19 adalah untuk memberikan imunitas sistem kekebalan tubuh kepada setiap masyarakat yang melaksanakan vaksinasi (Argista, 2021).

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai vaksinasi COVID-19 mulai dari perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan hingga denda bagi masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi (Pratama, 2021). Vaksinasi COVID-19 diberikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun dengan kondisi fisik yang sehat. Setiap masyarakat akan diberikan 2 kali dosis vaksin dengan jarak minimal 14 hari. Vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa adanya pungutan biaya sama sekali.

Program vaksinasi COVID-19 tahun 2021 hadir bukan tanpa tantangan, pasalnya masih terdapat masyarakat yang menolak melakukan vaksinasi COVID-19 meskipun pada kenyataannya telah diberi izin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 (2020) bahwa responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin, serta menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin. Alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin (30%); keraguan terhadap efektivitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12%); dan alasan keagamaan (8%). Disamping itu, berdasarkan survei tersebut juga ditemukan bahwa provinsi dengan tingkat penerimaan vaksin paling rendah yaitu Provinsi

Aceh (46%) dan Provinsi Sumatera Barat (47%) (Kemenkes RI, UNICEF, ITAGI, dan WHO, 2020).

Program vaksinasi merupakan suatu hal yang cukup baru, yang tentunya perlu adaptasi dan pengenalan program tersebut kepada masyarakat. Melalui komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan. Komunikasi tersebut tentunya akan berhasil apabila dilakukan dengan baik dan benar untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman pada masyarakat terkait tujuan dan implementasi vaksin COVID-19 yang sebenarnya. Komunikasi berperan penting pada proses mengajak masyarakat dalam mengubah sikap dan perilaku agar bersedia melakukan vaksinasi COVID-19. Suatu pesan yang disampaikan akan dikatakan berhasil pada komunikasi apabila dapat diinterpretasikan sama dengan apa yang dimaksud komunikator (Liliweri, 2011:34).

Terdapat penelitian terkait yang dilakukan oleh Sukmana, dkk (2021) tentang “Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala”. Penelitian tersebut mendapatkan temuan bahwa, dalam proses penyampaian informasi vaksinasi COVID-19 oleh para petugas kesehatan masih kurang efektif. Petugas kesehatan di Kab. Barito Kuala masih belum memahami dan memperhatikan unsur penting dalam proses komunikasi, yaitu komunikasi, pesan yang disampaikan, media untuk menyampaikan pesan, *audience*, serta apa efek yang diharapkan dari pesan yang disampaikan. Seorang petugas kesehatan harus mampu menyampaikan pesan kesehatan secara jelas karena ini lebih menyangkut pada jiwa seseorang. Serta, petugas kesehatan di Kab. Barito Kuala masih kurang

mampu dalam menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan latar belakang komunikannya.

Selanjutnya, penelitian terkait juga yang dilakukan oleh (Wulandari, 2021) tentang “Komunikasi MUI Provinsi Bengkulu dalam Mensosialisasikan Vaksinasi COVID-19”. Penelitian ini memberikan temuan bahwa, MUI Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat menggunakan media *Group WhatsApp*. Disamping itu, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa MUI Provinsi Bengkulu dalam melakukan komunikasi cenderung kurang efektif dan tidak kritis dengan hanya mensosialisasikan informasi vaksinasi COVID-19 lewat media *Group WhatsApp* saja. Pesan-pesan yang disampaikan tersebut belum tentu tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, dan bisa saja pesannya terhenti pada anggota yang berada dalam media tersebut.

Beberapa penelitian diatas, mengungkapkan bahwa pada dasarnya dalam upaya komunikasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pada masyarakat sangat diperlukan pemahaman yang baik, terkait proses komunikasi efektif yang dilakukan secara keseluruhan. Baik itu dari segi komunikatornya, media yang digunakan, siapa komunikannya, serta hambatan yang ditemukan. Pada sisi lain, agar tujuan komunikasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dapat berhasil, hal tersebut juga tergantung pada bagaimana kemampuan komunikator tersebut dalam menguasai setiap unsur komunikasi yang ada didalamnya. Terkait dengan kedua penelitian diatas, perbedaan penelitian terdahulu dengan masalah penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini berusaha untuk melihat tentang bagaimana versi upaya komunikasi yang dilakukan oleh komunikatornya yaitu Tenaga Kesehatan

di Puskesmas Pakan Rabaa. Penelitian ini berusaha untuk mengulas dan mendeskripsikan upaya si komunikator dalam berkomunikasi.

Dari uraian permasalahan diatas, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian pada upaya komunikasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pakan Rabaa dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Serta hambatan yang timbul dari upaya komunikasi yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, maka penelitian ini peneliti beri judul **“Komunikasi Tenaga Kesehatan dalam Mengajak Masyarakat Melakukan Vaksinasi COVID-19 (Studi Deskriptif pada ASN di Puskesmas Pakan Rabaa).**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti dapat menarik sebuah rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yakni: **“Bagaimana upaya komunikasi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pakan Rabaa dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19 ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, untuk :

- 1.3.1 Mendeskripsikan upaya komunikasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pakan Rabaa dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19.
- 1.3.2 Mendeskripsikan teknik komunikasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pakan Rabaa dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya pengembangan dan perspektif baru pada kajian manajemen komunikasi, khususnya pada implementasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori komunikasi khususnya pada komunikasi dengan masyarakat.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan kajian salah satu upaya mensukseskan program pemerintahan, terutama tentang vaksinasi COVID-19 dalam rangka penurunan angka kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia.
2. Sebagai bahan evaluasi atas implementasi kemampuan komunikasi tenaga kesehatan dalam upayanya di lapangan (masyarakat).
3. Besar harapan peneliti, agar penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai sumber bacaan berkualitas dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pembaca.